

ABSTRAK

Indonesia menjadi satu dari banyak negara terdampak pandemi yang mengalami kenaikan tingkat kasus pelanggaran data pribadi dan baru akan memiliki undang-undang khusus Pelindungan Data Pribadi (PDP). Berdasarkan kerangka analisis sekuritisasi dan pembingkai ancaman yang terjadi melalui tiga fase, keputusan Indonesia untuk merumuskan kebijakan merupakan hasil resonansi pembingkai ancaman keamanan PDP oleh aktor internasional. Berfokus pada studi kasus penyusunan RUU PDP yang sedikit banyak melibatkan proses lintas batas, penelitian ini berargumen bahwa aktor internasional sebagai aktor pembingkai berperan dominan sebagai katalisator dalam penyusunan RUU PDP. Meskipun tidak dalam bentuk intervensi langsung, aktor internasional mendorong proses difusi ide dan adopsi standar internasional di Indonesia.

Kata kunci: *aktor internasional, sekuritisasi, pembingkai ancaman, pelindungan data pribadi, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Indonesia*

ABSTRACT

Indonesia is one of many countries affected by the pandemic that has experienced an increase in the rate of personal data breach cases and is on the verge of enacting specific legislation on Personal Data Protection (PDP). Utilizing the analytical framework of securitization and threat-framing spanning three phases, Indonesia's initiative to formulate the policy stems from the resonance of the PDP security threat framing by international actors. Focusing on a case study of the PDP Bill formulation, which involved a cross-border process, this research argues that international actors as framing actors played a dominant role as catalysts in the drafting of the PDP Bill. Although not directly intervening, international actors encouraged the diffusion of ideas and the adoption of international standards in Indonesia.

Keywords: *international actors, securitization, threat framing, personal data protection, Personal Data Protection Bill, Indonesia*